KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN 2019

Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Disampaikan oleh:

Kunta W.D. Nugraha, Ph.D

Direktur Penyusunan APBN, DJA

Kuliah Umum PKN STAN

21 November 2018

Pokok Bahasan

1. **Perekonomian Dunia dan Domestik**
2. **APBN 2019**

1 Perekonomian Dunia dan Domestik

Risiko global meningkat seiring tensi perdagangan yang semakin intensif dan likuiditas yang mengetat

Dalam World Economic Outlook Oktober 2018, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2018-2019
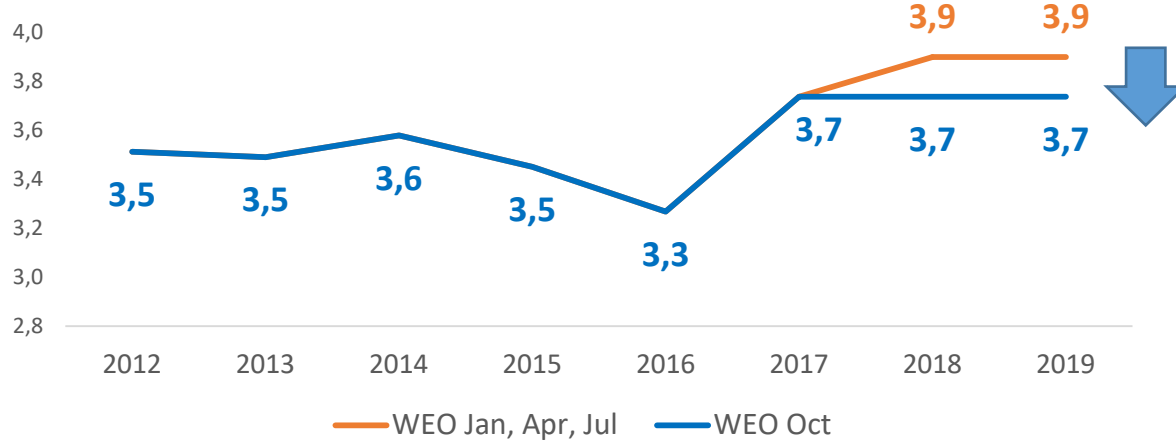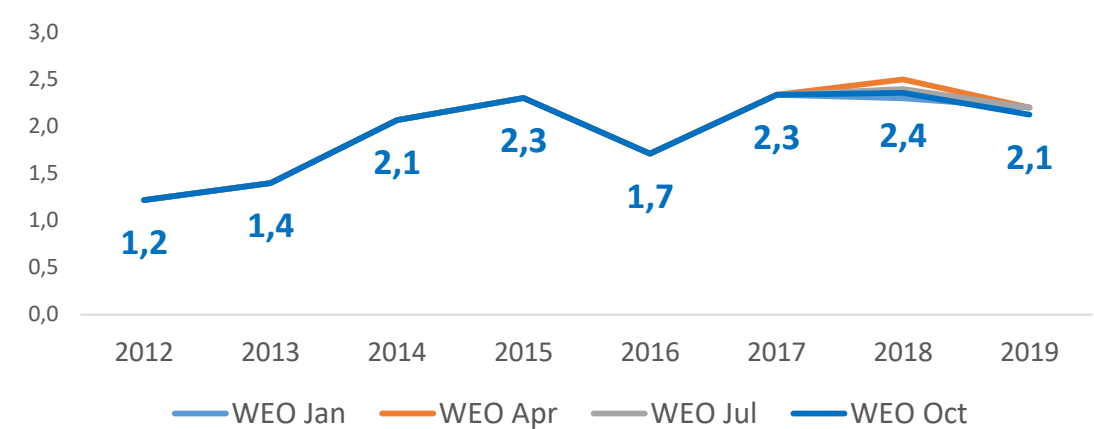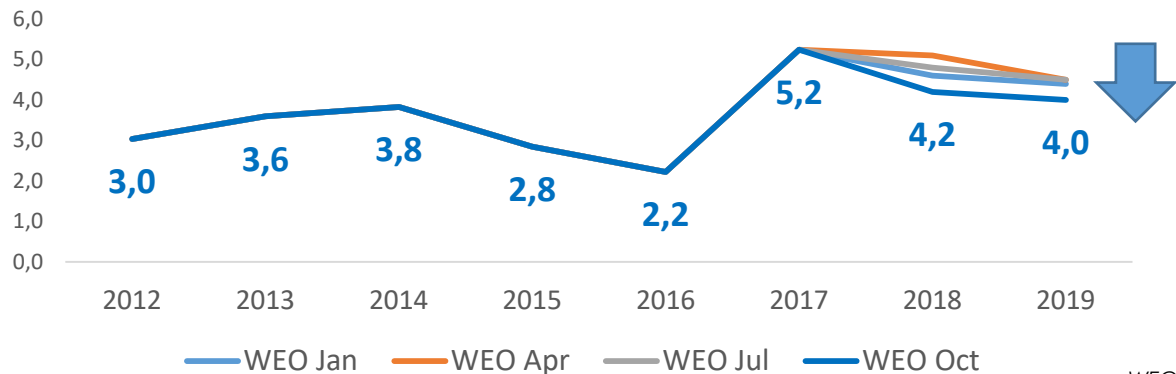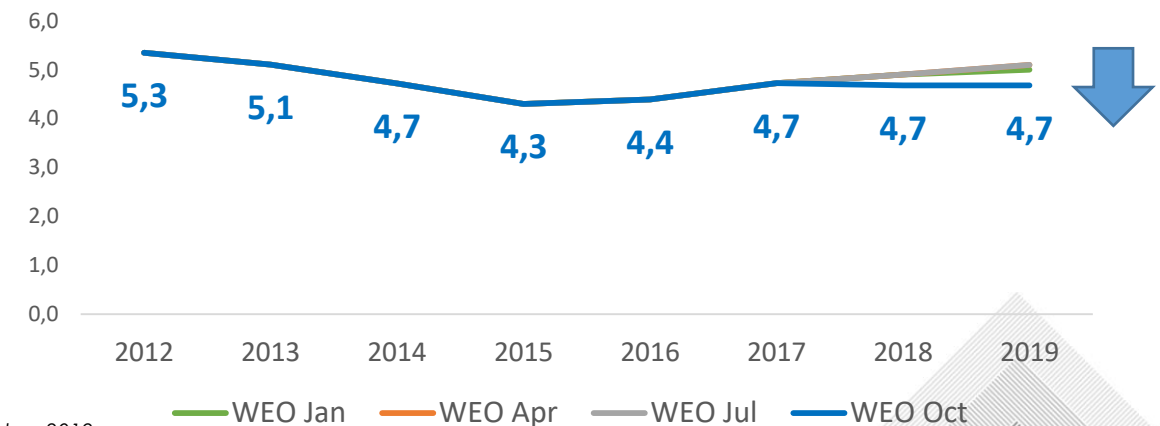
source: WEO IMF, October 2018

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melanjutkan peningkatan

Sumber: BPS, Diolah

Kontribusi Pertumbuhan PDB Sektoral (yoy)
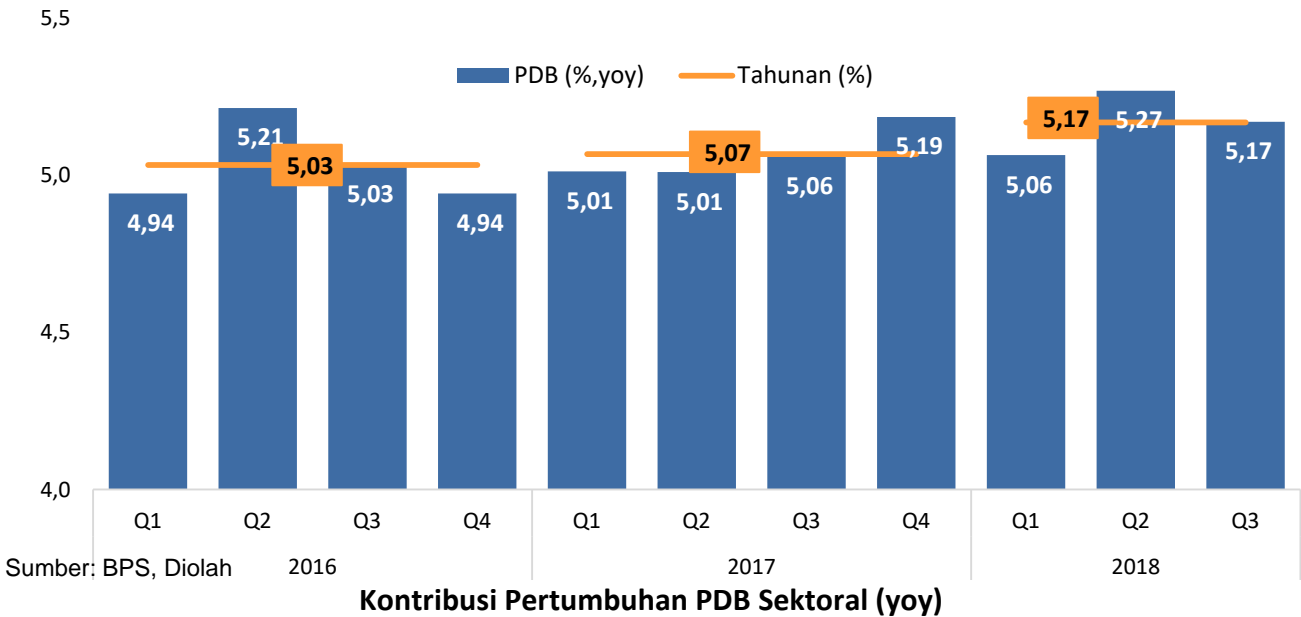
SEKTOR	Q3 2016	Q3 2017	Q3 2018	Distribusi Q3 2018
Primer *Pertanian dan Pertambangan*	0.46	0.53	0.70	21.64
Sekunder *Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi*	1.48	1.75	1.54	31.27
Tersier *Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya*	2.31	2.49	2.62	42.80

SISI PRODUKSI

- Sektor primer dan tersier memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
- Sektor tersier memiliki distribusi tertinggi, seiring dengan pertumbuhan tertinggi Q3 yang dicapai oleh lapangan usaha di sektor ini yakni jasa lainnya, diikuti informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan.

Pertumbuhan Q3 2018 mencapai 5,17%, dan merupakan pertumbuhan Q3 tertinggi sejak 2014.
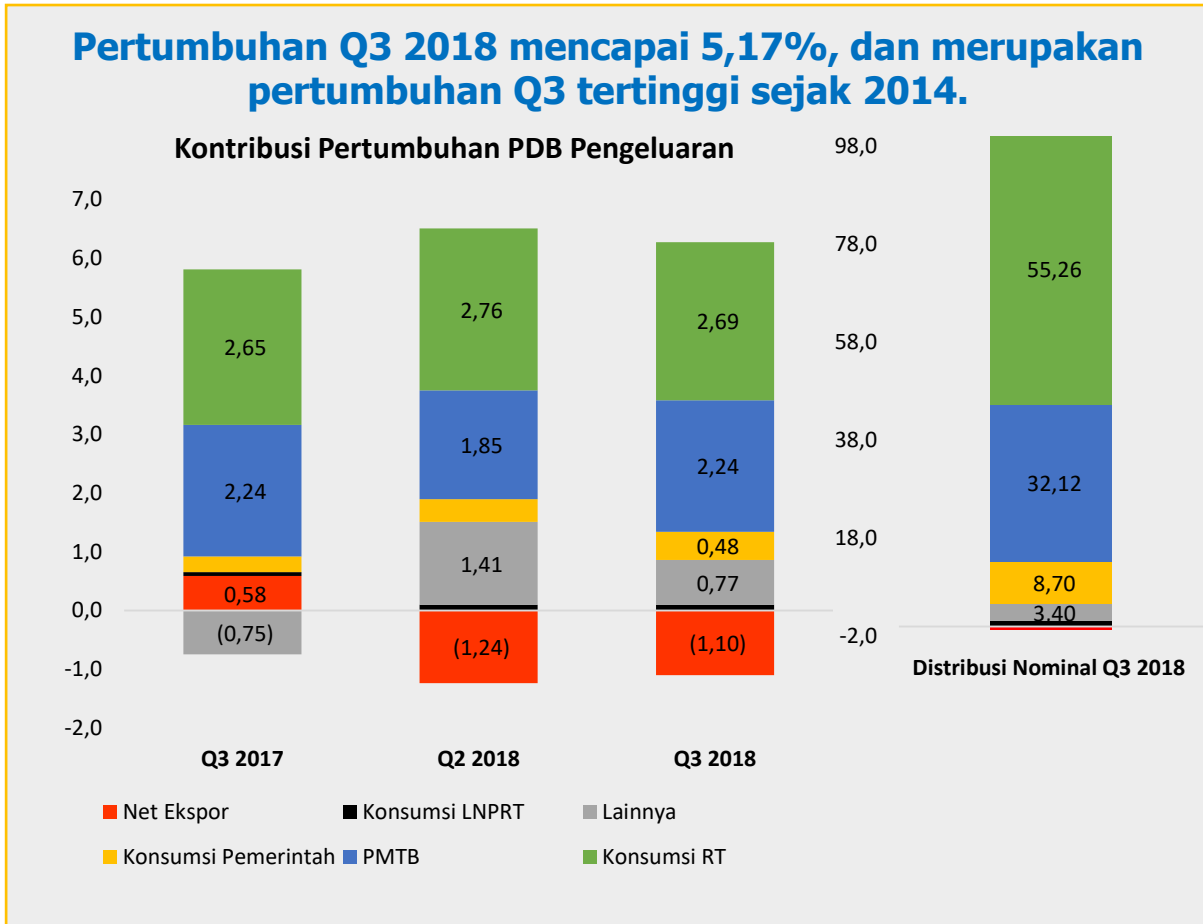
SISI PENGELUARAN

- Kontribusi **konsumsi RT** tetap dominan, meski memiliki kontribusi lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.
- Kontribusi **PMTB** dan **Konsumsi Pemerintah** meningkat dibandingkan Q2 2018 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan di Q3 2018.
- **Perdagangan internasional** masih menunjukkan kontribusi negatif sejalan dengan masih terbatasnya pertumbuhan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 diproyeksikan akan membaik

Komponen PDB	2019
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,0
Ekspor	6,3
Impor	7,1
Pertumbuhan PDB	**5,3**

- Penyelesaian **pembangunan infrastruktur** diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi.
- **Tingkat konsumsi** diperkirakan masih tumbuh baik, terutama bersumber dari penciptaan lapangan kerja dan tingkat inflasi yang terjaga.
- Namun demikian tahun 2019 terdapat banyak **tantangan**, termasuk tekanan dari volatilitas sektor keuangan global yang bersumber dari kebijakan moneter AS dan ketidakpastian dalam perdagangan global akibat perang dagang,
- Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan investasi di tengah upaya menjaga **stabilitas perekonomian** (*stability over growth)*

PERTUMBUHAN MENURUT PRODUKSI

- **Sektor Industri Pengolahan** terus didorong sebagai penggerak pertumbuhan. Fokus pada industri unggulan, a.l. : pangan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik sejalan dengan roadmap *Making Indonesia 4.0*
- **Sektor Perdagangan** diperkirakan meningkat seiring daya beli masyarakat yang terjaga serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa domestik serta ekspor-impor
- **Sektor Konstruksi** tetap konsisten tumbuh tinggi seiring dengan investasi bangunan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- **Sektor Transportasi dan pergudangan** tumbuh tinggi didukung pembangunan infrastruktur transportasi baru seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, serta beroperasinya moda transportasi baru di kota-kota besar seperti MRT dan LRT
- **Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum** diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan pencanangan beberapa destinasi wisata baru, serta pemasaran '*Wonderful Indonesia*'

Pertumbuhan	2019
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,8
Pertambangan dan Penggalian	0,6
Industri Pengolahan	5,1
Pengadaan Listrik dan Gas	6,1
Pengadaan Air, ... dan Daur Ulang	5,0
Konstruksi	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran	5,3
Transportasi dan Pergudangan	8,8
Akomodasi Makan Minum	6,1
Informasi dan Komunikasi	10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,9
Real Estate	4,3
Jasa Perusahaan	8,2
Administrasi Pemerintahan ...	4,0
Jasa Pendidikan	5,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2
Jasa lainnya	8,8
PDB	**5,3**

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Nilai tukar disesuaikan secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global

↓

APBN menjadi lebih realistis dan kredibel

		Outlook 2018	RAPBN 2019	APBN 2019
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,3	5,3
	Inflasi (% yoy)	3,5	3,5	3,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.294	14.400	15.000
	Suku Bunga SPN (%)	5,0	5,3	5,3
	Harga Minyak (US$/barrel)	70	70	70
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	775	750	775
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.131	1.250	1.250
	Cost Recovery (miliar USD)	11,3	11,3	10,22
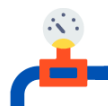
2 APBN 2019

Perubahan nilai tukar dan lifting berdampak pada meningkatnya pendapatan dan belanja negara, namun defisit tetap dijaga 1,84% terhadap PDB

Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019		
	Outlook APBN	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.903,0**	**2.142,5**	**2.165,1**	**22,6**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.897,6**	**2.142,1**	**2.164,7**	**22,6**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.781,0	1.786,4	5,4
Tax Ratio (%)	*11,57*	*12,11*	*12,22*	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	361,1	378,3	17,2
II. PENERIMAAN HIBAH	**5,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
B. BELANJA NEGARA	**2.217,3**	**2.439,7**	**2.461,1**	**21,4**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.453,6**	**1.607,3**	**1.634,3**	**27,0**
1. Belanja K/L	813,5	840,3	855,4	15,2
2. Belanja Non K/L	640,2	767,1	778,9	11,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**763,6**	**832,3**	**826,8**	**(5,6)**
1. Transfer ke Daerah	703,6	759,3	756,8	(2,6)
2. Dana Desa	60,0	73,0	70,0	(3,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(64,8)**	**(21,7)**	**(20,1)**	**1,6**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(314,2)**	**(297,2)**	**(296,0)**	**1,2**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	***(2,12)***	***(1,84)***	***(1,84)***	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**314,2**	**297,2**	**296,0**	**(1,2)**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**387,4**	**359,3**	**359,3**	**(0,0)**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(65,7)**	**(74,8)**	**(75,9)**	**(1,1)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**(6,5)**	**(2,3)**	**(2,4)**	**(0,1)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**(1,1)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**0,2**	**15,0**	**15,0**	**0,0**

APBN Sehat : Defisit APBN tahun 2019 semakin turun dan Keseimbangan Primer menuju arah positif

Rasio Defisit APBN diturunkan menjadi 1,84% terhadap PDB → terendah sejak 2013
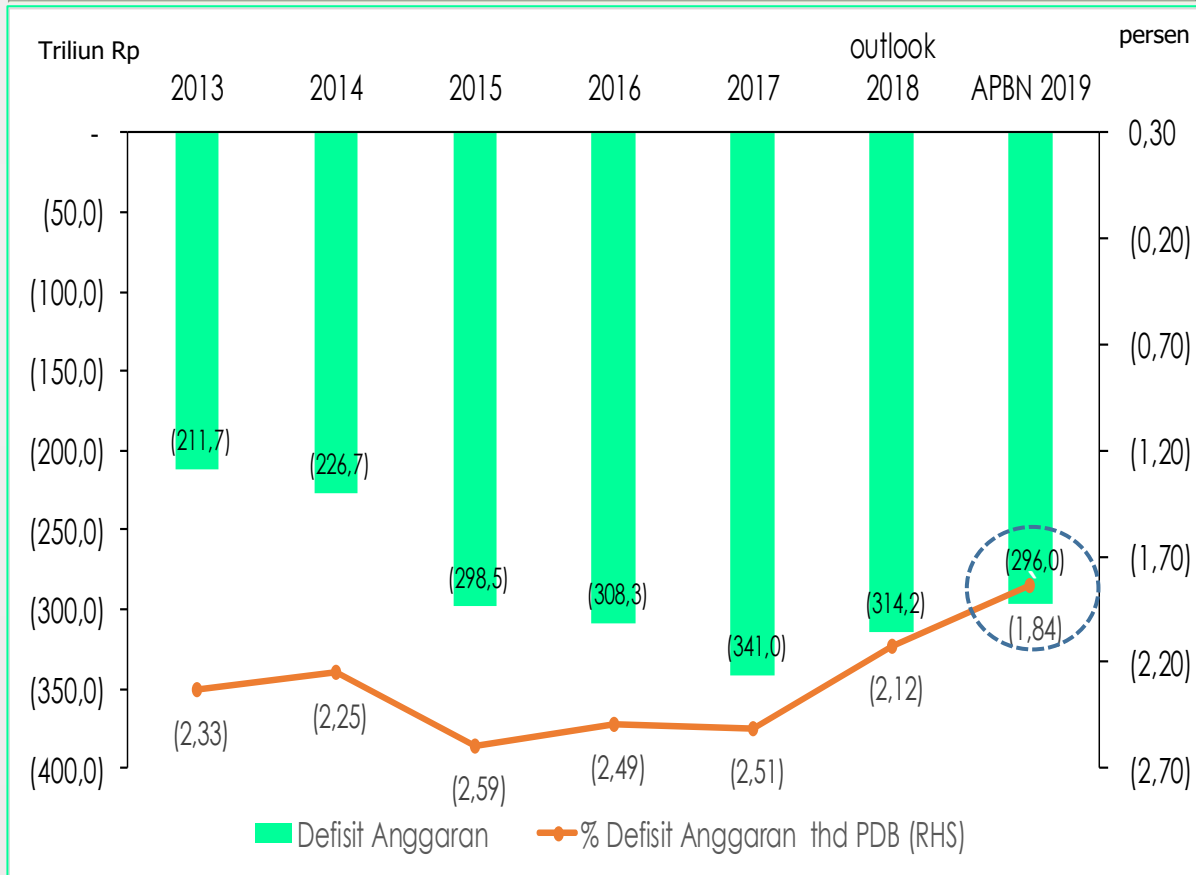
Keseimbangan Primer mendekati Rp0 → konsisten turun sejak 2015
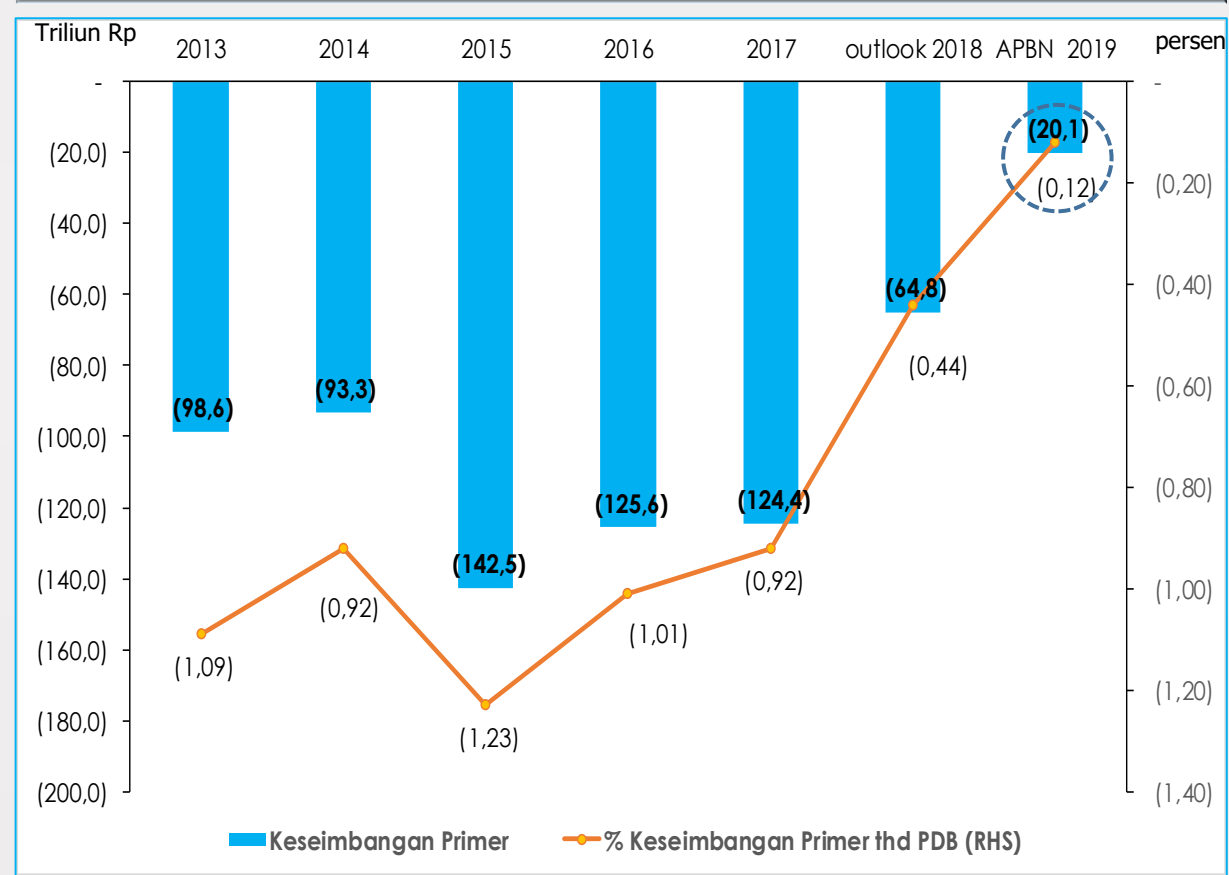
APBN Adil: Keseimbangan antara Pembangunan Fisik dan SDM, Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pajak yang progresif

Pajak Menjadi Insentif Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat & Ekonomi

- **Kenaikan PTKP**

  2013 : Rp24,3 juta

  2016 : Rp54,0 juta

- **Penurunan tarif PPh**

  UMKM menjadi 0,5%

  (sejak Juli 2018)

Insentif Pajak bagi Dunia Usaha (*tax holiday/ allowance*)

- **Dilakukan *targeted***
- **Dengan Kriteria & syarat tertentu a.l :**

  Industri Pionir

  Mempertimbangkan nilai investasi, orientasi ekspor, & penyerapan tenaga kerja

Penguatan dan Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM

Anggaran Infrastruktur
2015:Rp256,1 2019:Rp415,0 T

Anggaran Pendidikan
2015:Rp390,1 T 2019:Rp492,4 T

Anggaran Kesehatan
2015: Rp65,9 T 2019:Rp123,1 T

Anggaran perlindungan sosial
2015: Rp249,4 T 2019:Rp381,0 T

Terdapat beberapa program yang beririsan

Memperkokoh keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah

Transfer ke Daerah & Dana Desa

2015
Rp623,1 T

2019
Rp826,8 T

Belanja K/L

2015
Rp732,1 T

2019
Rp855,4 T

APBN Mandiri: Penerimaan Pajak Menjadi Sumber Utama Belanja Negara

Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi 82,5% (2013: 74,9%) thd pendapatan negara
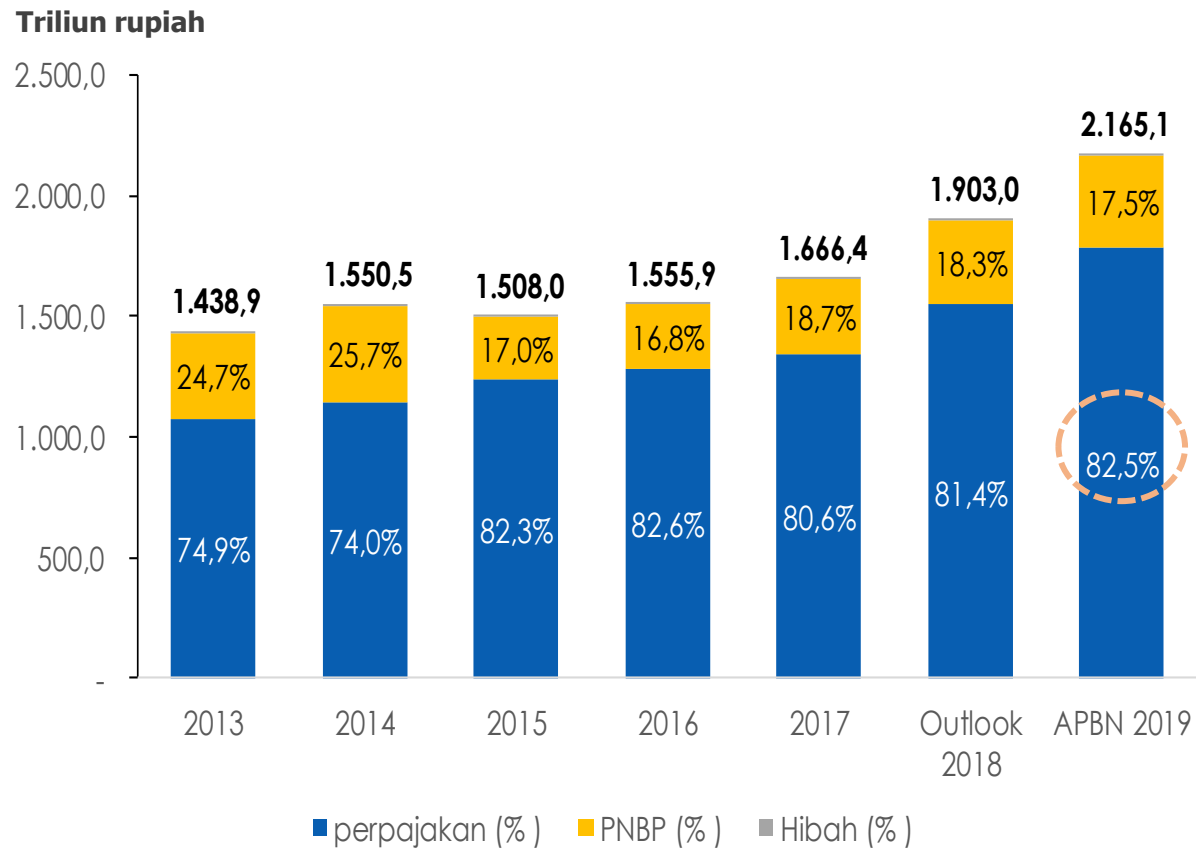
Pembiayaan utang semakin menurun
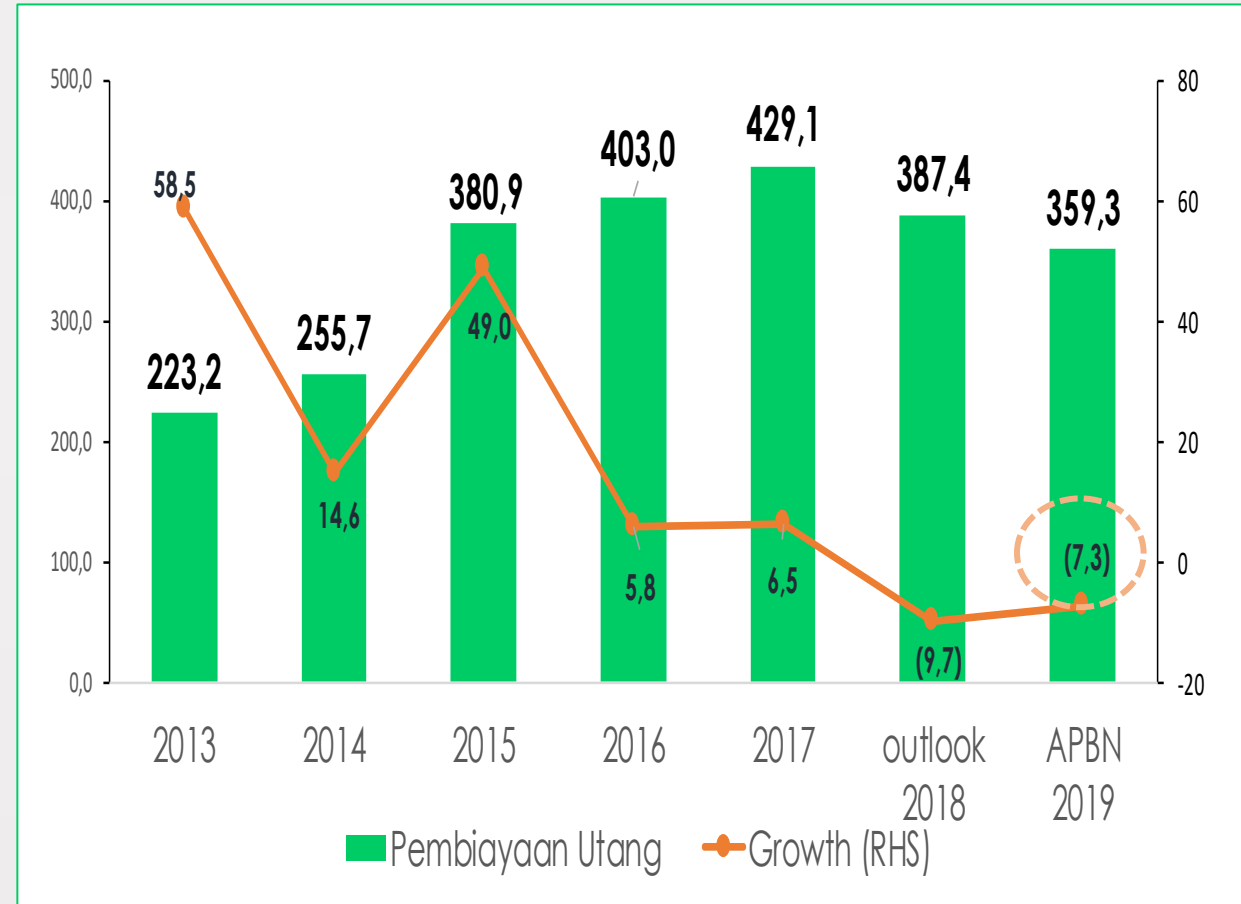
Penerimaan Perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari *outlook* APBN 2018 → didukung reformasi perpajakan

Lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir (2008-2017 tumbuh 11,1%)
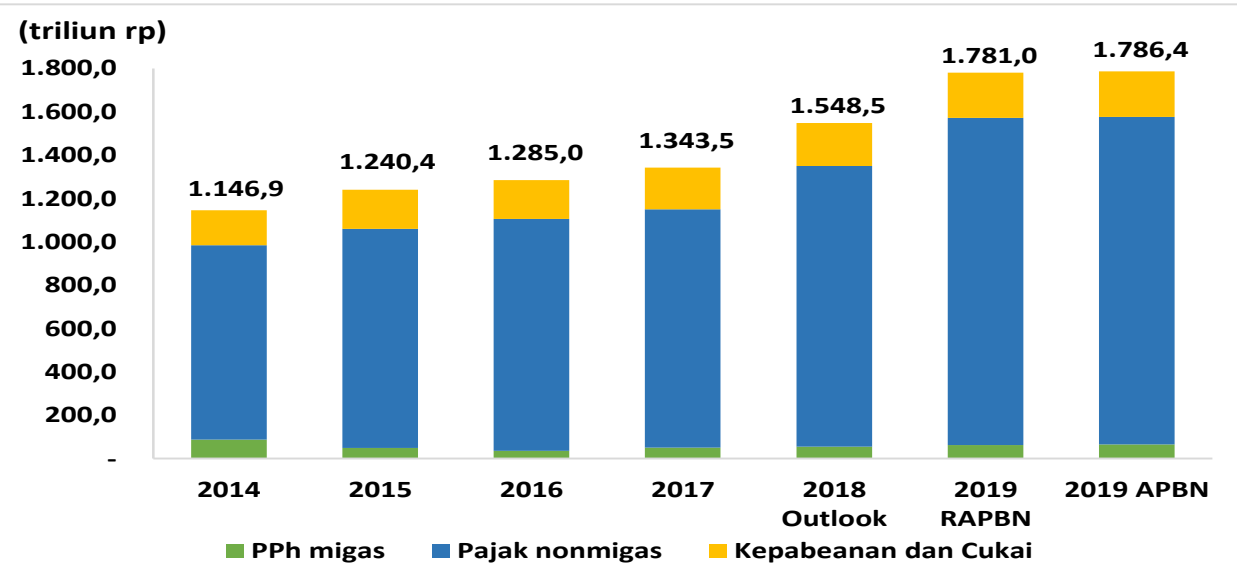
Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin meningkat → menuju kemandirian

dari 74% di tahun 2014 menjadi 82,5% di tahun 2019

Pajak tetap Menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing

Insentif fiskal (Tax Allowance, Tax Holiday)

Tax ratio terus meningkat → 12,2% di tahun 2019
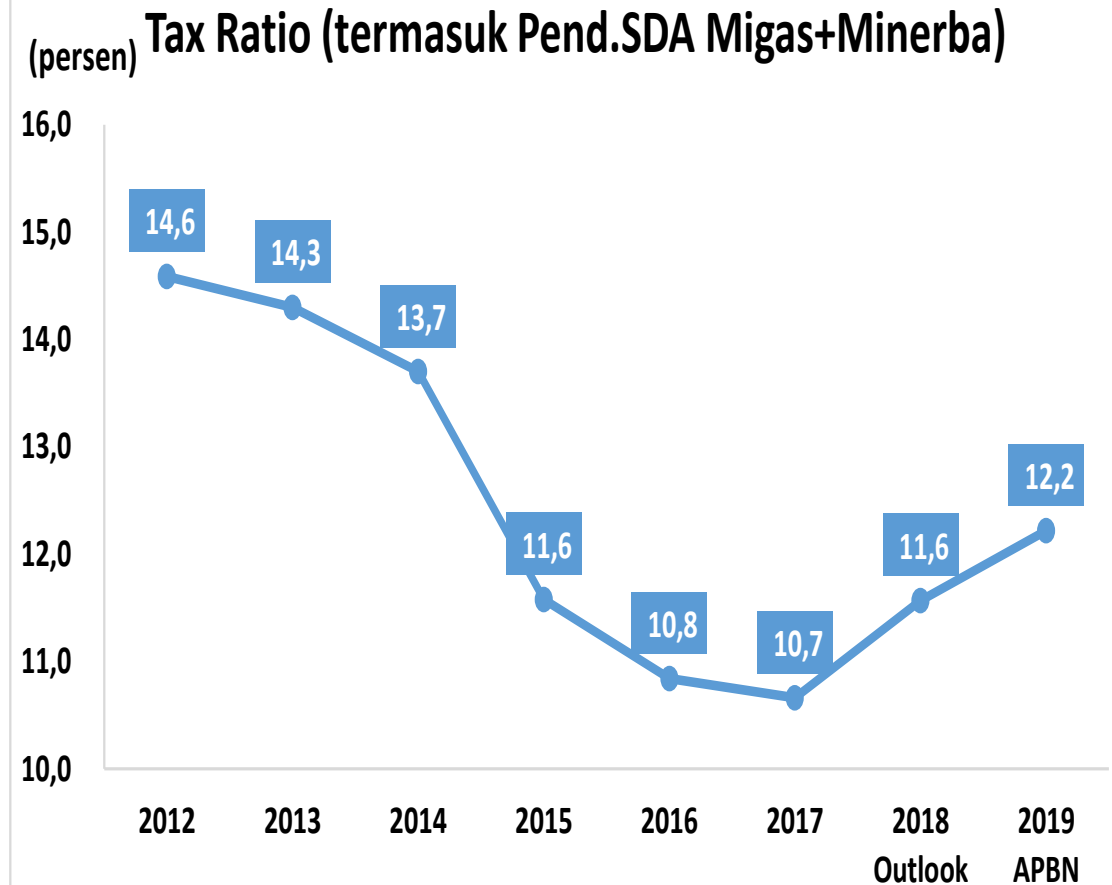
Belanja Pemerintah dalam Tahun 2019 difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, serta penguatan *value for money*

Pembangunan SDM

Anggaran Pendidikan Rp492,5 T

Anggaran Kesehatan Rp 123,1 T

Bidang Pendidikan, a.l. untuk:

- 20,1 juta siswa penerima KIP
- 471,8 ribu mahasiswa penerima beasiswa Bidik misi
- Penguatan pendidikan Vokasi
- Percepatan pembangunan sarpras

Bidang Kesehatan, a.l. untuk:

- Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN)

Penyelesaian Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur Rp415,0 T

Pembangunan /rekonstruksi/ pelebaran Jalan

2.007 km

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan Irigasi 162 ribu Ha

Rasio Elektrifikasi

99,9 %

rumah susun dan khusus

10.742 unit

Bendungan

48 unit

Pembangunan Jalur kereta api

(tahap awal, penye-lesaian, peningkatan)

415,2 km'sp

Perlindungan Sosial

Anggaran Perlindungan Sosial Rp385,2 T

PKH → 10 juta Keluarga dengan peningkatan Manfaat

Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)→ untuk 15,6 juta keluarga dengan perbaikan penyaluran

Subsidi Bunga:

- Kredit usaha kecil dan mikro
- Perumahan

Pelaksanaan Agenda Demokrasi

Anggaran Hankam Rp220,5 T

Anggaran Pemilu Rp 24,8 T

Agenda Demokrasi

- Penyelenggaran pemilu Presiden dan Anggota Legislatif 2019
- Pengamanan Pemilu 2019

Pertahanan

Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan

Keamanan

penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik

Birokrasi yang efektif dan efisien

Anggaran Rp381,3 T

Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kesejahteraan aparatur dan pensiunan

Antisipasi ketidakpastian

Anggaran Rp52,6 T

Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, keamanan

Pengalokasian Pooling Fund untuk Penanggulangan Bencana Rp1 T

- Sumber-sumber pendanaan:
  - ✓ APBN (Rupiah Murni)
  - ✓ PHLN termasuk pinjaman siaga bencana
  - ✓ Kontribusi daerah
  - ✓ Sumber lain yang sah

Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20% APBN, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM
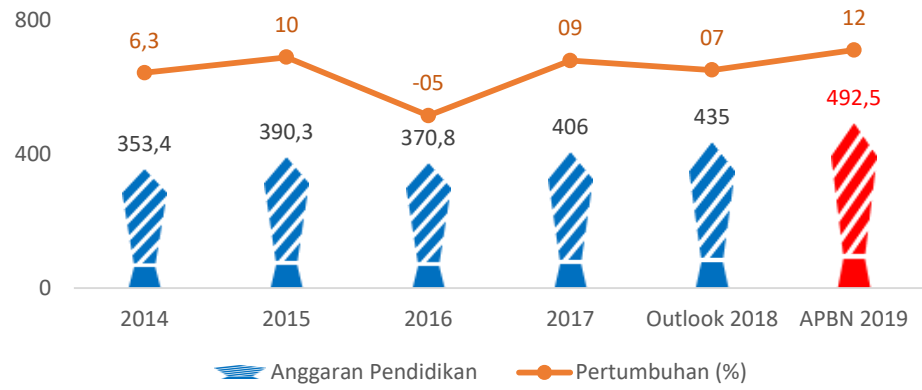
Triliun Rupiah	2018	2019 APBN	2019 RAPBN
Melalui Belanja Pusat	**149,7**	**163,1**	**158,0**
Kemendikbud	40,1	36,0	36,0
Kemenag	52,7	51,9	51,9
Kemenristekdikti	40,4	40,2	40,2
Kemen PUPR	-	6,6	6,6
Melalui Transfer	**279,5**	**308,4**	**309,9**
DAU*)	153,2	168,8	168,6
DAK Fisik	9,1	16,9	18,7
DAK Non Fisik	112,3	117,7	117,7
Melalui Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan Dana Abadi Penelitian)	**15,0**	**21,0**	**20,0**

Anggaran pendidikan melalui belanja pusat termasuk tambahan untuk Polri, TNI, BPPT Rp1,25 T

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Akses

a. Peningkatan efektivitas BOS → BOS berdasarkan kinerja dan afirmasi
b. Kelanjutan Program Indonesia Pintar diikuti peningkatan ketepatan sasaran
c. Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kemen PU PR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR)
d. Perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi
e. Pengalokasian dana abadi penelitian
f. *Enforcement* pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda
g. *Penguatan* pendidikan vokasi untuk meningkatkan link and match dengan industri

Program Indonesia Pintar — **20,1 Juta siswa**

Bantuan Operasional Sekolah — **57,0 juta siswa**

Kemenag dan DAK

Beasiswa Bidik Misi — **471,8 ribu mahasiswa**

Pembangunan/ Rehab Ruang Kelas — **56,1 ribu**

Kemendikbud, Kemenag, Kemen PUPR, dan DAK

*) angka sementara

Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting

Triliun Rupiah
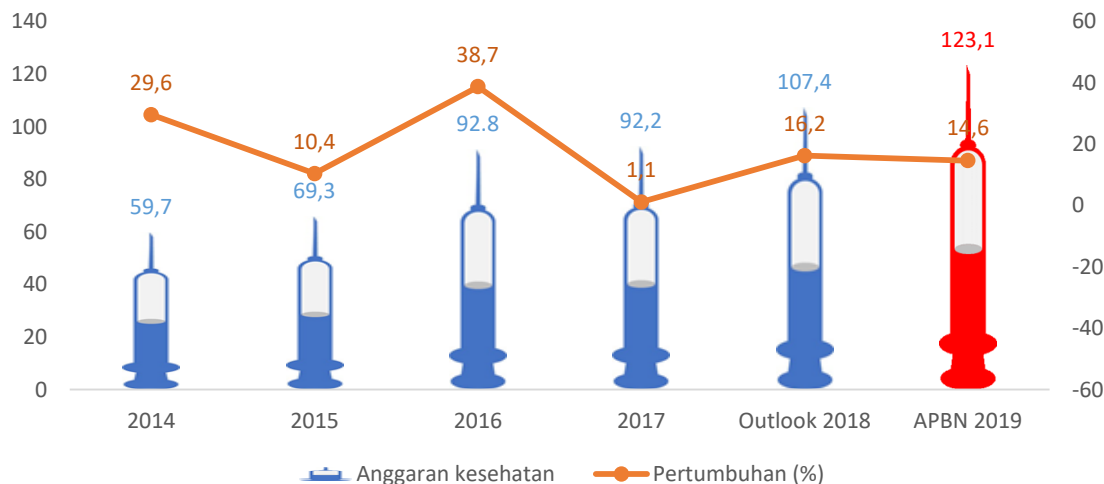
	2018	2019 APBN	2019 RAPBN
● Melalui **Belanja Pusat**	**81,5**	**89,8**	**88,2**
Kemenkes	59,1	58,7	58,7
BPOM	2,2	2,0	2,0
BKKBN	5,5	3,8	3,8
JKN PNS/TNI/POLRI	5,4	5,8	5,8
● Melalui **Transfer**	**29,5**	**33,4**	**33,7**
DAK Fisik	18,0	19,9	20,3
BOK dan BOKB	10,4	12,2	12,2

Anggaran kesehatan melalui belanja pusat termasuk tambahan untuk Polri dan TNI Rp1,0 T

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Akses

a. Perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (2019: 96,8 juta jiwa) → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
b. Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
c. Percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 Kabupaten kota (2018:100 kab/kota).
d. Melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan untuk keberlangsungan program JKN

Prevalensi Stunting

24,8%

Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk

245

Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

300

Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI)

96,8

*) angka sementara

Pembangunan infrastruktur diakselerasi melalui terobosan pembiayaan kreatif

Triliun Rupiah	2018	2019 APBN	2019 RAPBN
● Melalui **Belanja Pusat**	183,0	173,8	173,8
Kemen PU Pera*	104,7	108,2	108,2
Kemenhub*	44,2	38,1	38,1
*) alokasi belanja di luar belanja pegawai			
● Melalui **Transfer**	184,1	196,2	201,7
DAU dan DBH non earmark**	122,1	130,4	129,0
DAK	33,9	33,5	39,1
Dana Desa	24,0	28,0	29,2
**) pemanfaatan 25% untuk bidang infrastruktur			
● Melalui **Pembiayaan**	48,1	45,0	45,0
a.l. PMN	6,1	17,8	17,8
LMAN	35,4	22,0	22,0
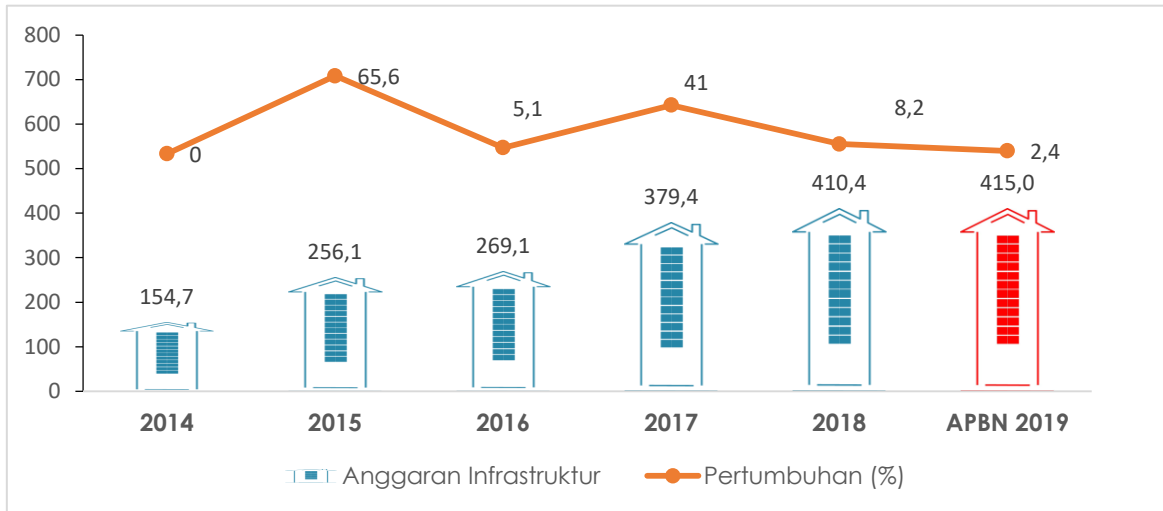
Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

- Perbaikan eksekusi proyek infrastruktur;
- Peningkatan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda;
- Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU AP.

Pembangunan / rekonstruksi/ Pelebaran Jalan (km) **2.007**

Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan (m) **27.067**

Pembangunan Bandara baru (unit) **4**

Pembangunan/ Penyelesaian Rel KA (km'sp) **415,2**

Jaringan Irigasi (ribu hektar) **162**

Bendungan (unit) **48**

*) angka sementara

Program Perlindungan Sosial diperkuat untuk meningkatkan Kesejahteraan Bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah
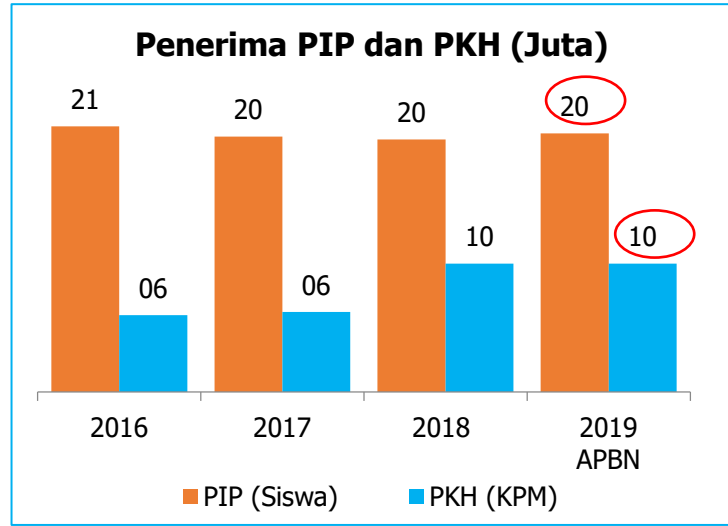
PIP:
Mendukung pencapaian target APM

PKH

a. Perluasan sasaran dari 3,5 juta (2015) menjadi 10 juta KPM
b. 2019: Alokasi PKH meningkat menjadi Rp34,4 triliun (2018:Rp19,3 triliun) untuk mendukung peningkatan nilai manfaat menjadi dua kali lipat bagi 10 juta keluarga miskin.
c. Dinilai paling efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

PBI

a. 2015-2019 : perluasan cakupan PBI dari 86,4 juta jiwa (2015) menjadi 96,8 juta (2019)
   → mendukung UHC

b. 2016 : penyesuaian bantuan dari Rp19.225,- menjadi Rp23.000,- per orang per bulan
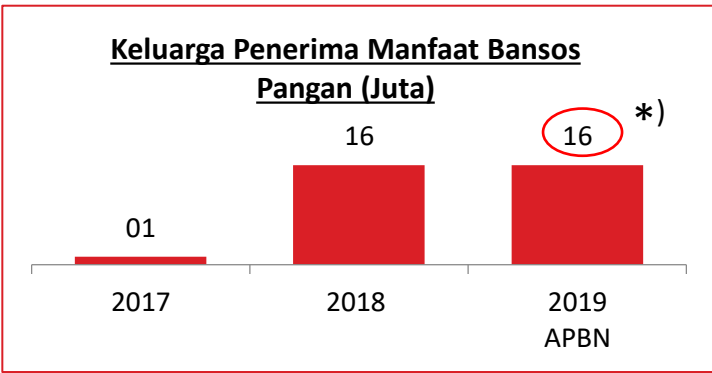
Bansos Pangan:

- Perubahan mekanisme penyaluran menjadi BPNT untuk:
  - menjamin ketepatan sasaran, waktu dan jumlah; dan
  - memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk memilih jenis, bahan pokok yang diperlukan
- Perluasan KPM BPNT dari 1,2 juta (2017), 10 juta (2018) dan direncanakan 15,6 juta (2019)
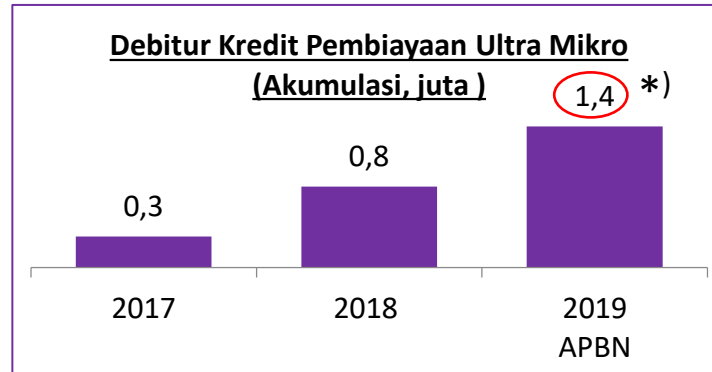
Kredit Ultra Mikro:

- Peningkatan jumlah sasaran penerima kredit Umi dari 0,3 juta debitur menjadi 1,4 juta debitur (kumulatif)
- Perluasan segmen debitur kepada usaha mikro pesantren

Bidikmisi:

- Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima bidikmisi dari 269,2 ribu Mahasiswa (2015) menjadi 471,8 ribu mahasiswa (2019)

Catatan : *) angka sementara

Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai

● APBN **224,3**
● RAPBN **220,9**
(triliun rupiah)

Subsidi Energi meningkat, terutama karena perubahan asumsi nilai tukar

160,0
156,5
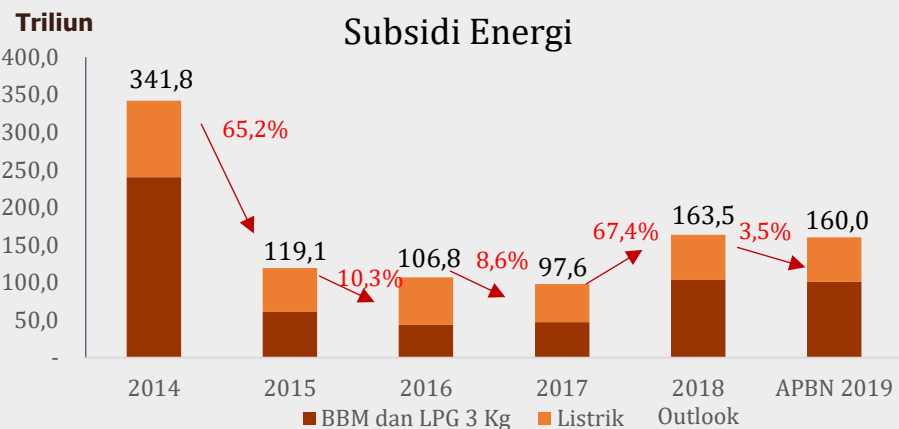
Subsidi BBM & LPG

100,7
100,1

- Melanjutkan **subsidi terbatas solar**
- **Perbaikan sasaran** penerima LPG: rumah tangga, usaha mikro, kapal bagi nelayan kecil

Subsidi Listrik

59,3
56,5

- **Subsidi tepat sasaran** untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA
- Peningkatan **rasio elektrifikasi**

Subsidi Non-energi ditetapkan sama sesuai usulan Pemerintah dalam RAPBN 2019

64,3
64,3

Subsidi Non Energi

Triliun

80,0
60,0
40,0
20,0
-

50,2 — 33,4% — 66,9 — 0,8% — 67,4 — 1,9% — 68,8 — 6,0% — 64,7 — 0,5% — 64,3

2014 2015 2016 2017 2018 Outlook APBN 2019

Pupuk, Pangan, Benih, PSO, Bunga Kredit Program, Pajak DTP
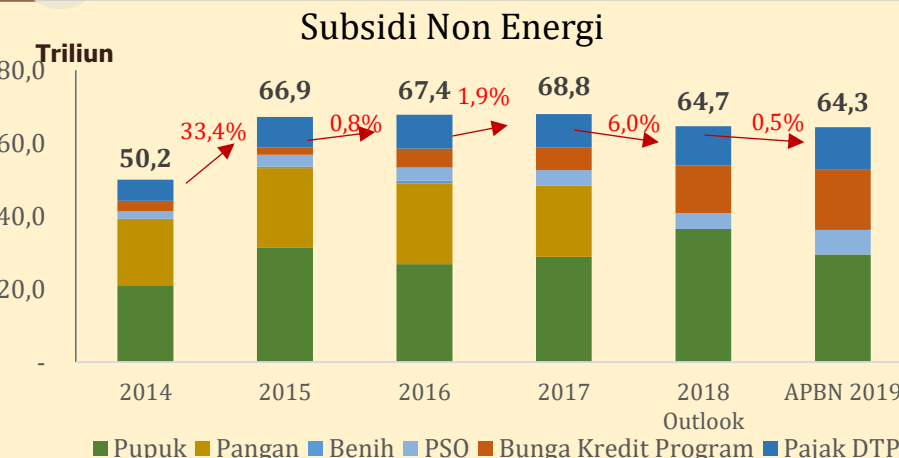
Subsidi Pupuk **29,5**

Untuk mendukung ketahanan pangan yang disesuaikan dengan **update luas lahan pertanian**

Subsidi Bunga KUR **12,0**

Target penyaluran KUR **Rp120 T** dengan suku bunga **7%** yang diperuntukkan **pembiayaan sektor produktif** bagi UMKM dan TKI

Subsidi Bunga Kredit Perumahan **3,5**

Subsidi kredit perumahan bagi MBR dengan penerbitan sebanyak 100 ribu unit

Peningkatan TKDD untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah, disertai prinsip *Value For Money*

Peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara **proporsional** (sesuai kebutuhan daerah, kapasitas daerah dan kemampuan keuangan negara)

Mendukung **kebutuhan pendanaan daerah** (untuk penyelenggaraan layanan dan pembangunan)

Fokus untuk **mengurangi kesenjangan layanan** antar-daerah

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran TKDD dengan belanja K/L

Menjaga **kesinambungan program pembangunan** 5 tahun (Pembangunan SDM, Konektivitas, destinasi pariwisata, pengurangan kemiskinan, penguatan Dana Desa)

Mendorong penggunaan belanja di daerah yang **efektif, efisien, dan produktif** berdasarkan prinsip *value for money.*

Pertama kali
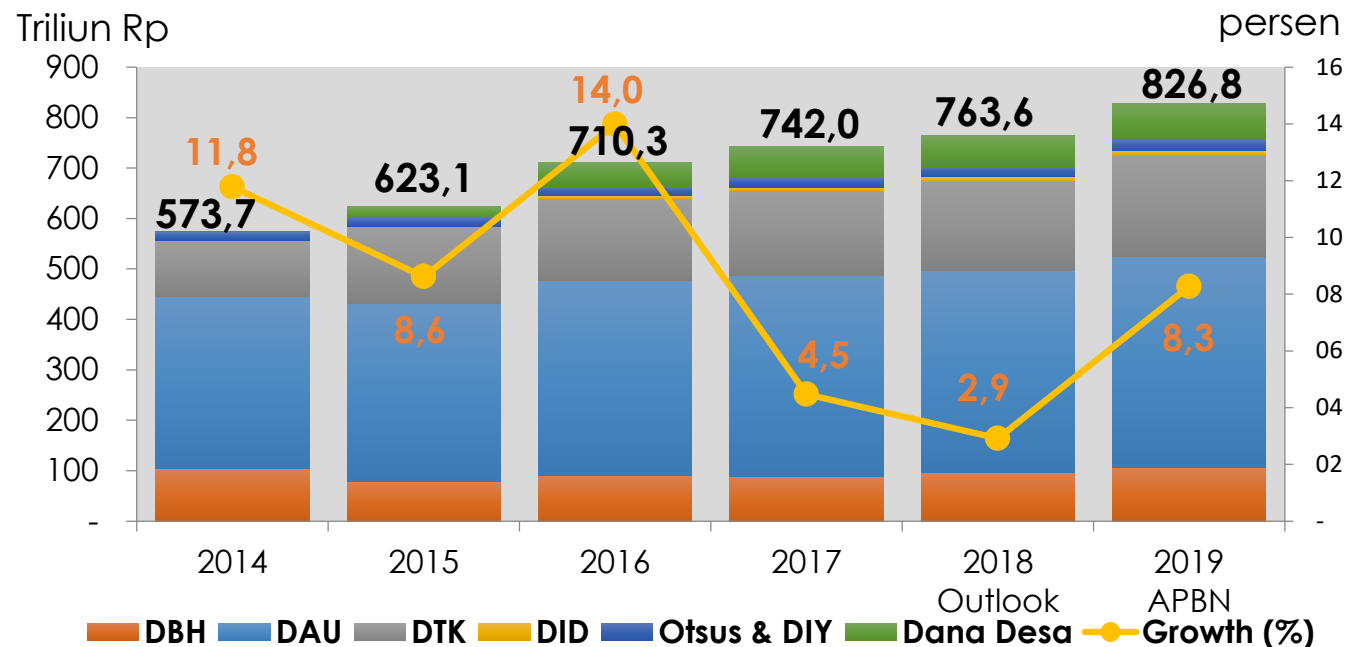
Pengalokasian DANA KELURAHAN Rp3 T

Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pembiayaan Utang menurun dalam 2 tahun terakhir Menunjukkan Kesehatan dan Kemandirian APBN

Pertumbuhan pembiayaan utang cenderung menurun dari tahun 2015, dan bahkan tumbuh negatif di 2018 dan 2019
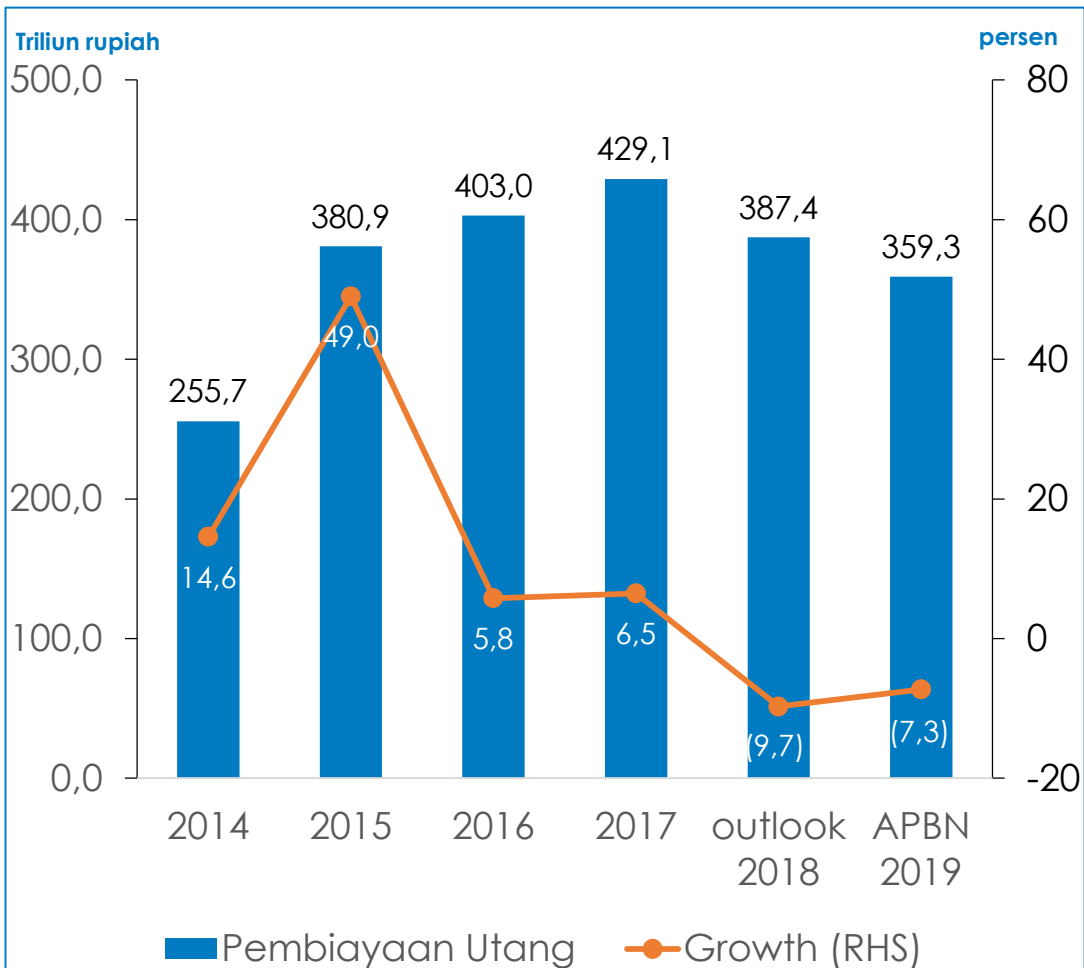
Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

- **Hati-hati**
  menjaga rasio utang terhadap PDB.
- **Efisiensi**
  - Menjaga akuntabilitas pengelolaan utang
  - Meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali
- **Produktif**
  - pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;
  - menjaga komposisi utang dalam batas *manageable*;
  - menjaga solvabilitas.
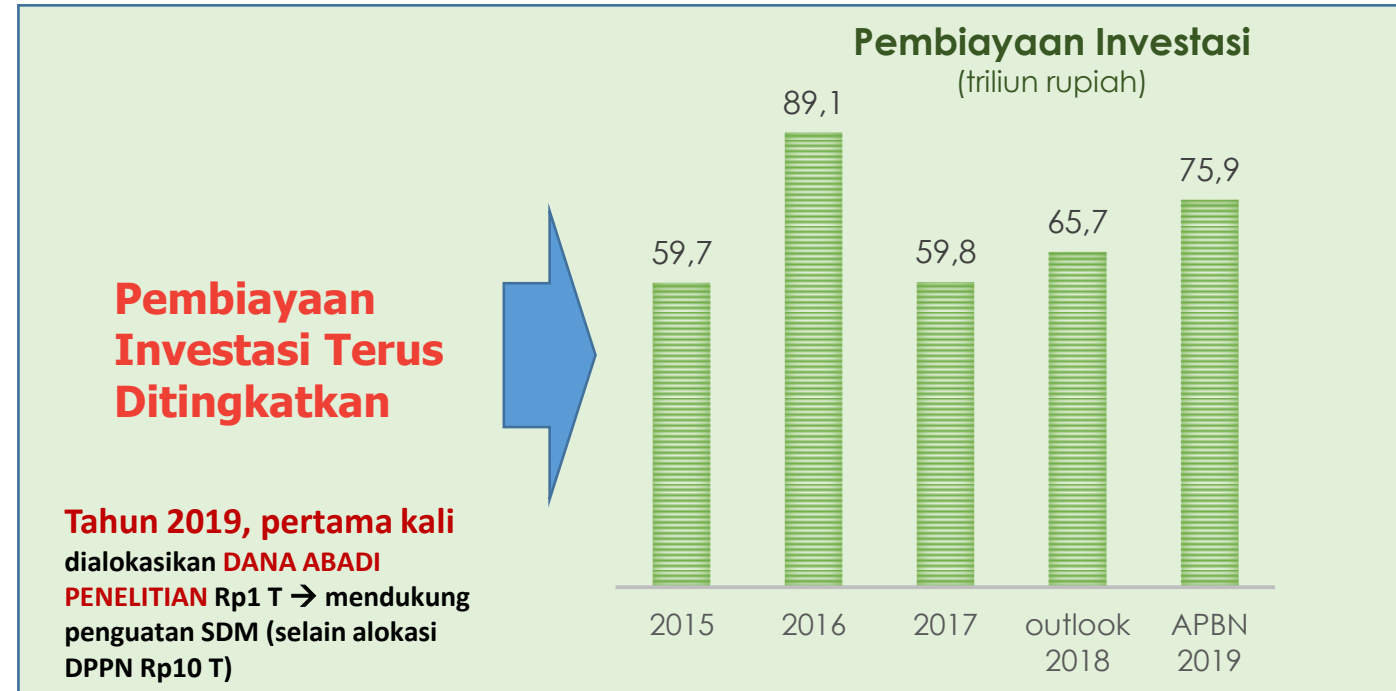
Kesimpulan

Postur APBN Sehat, Adil, dan Mandiri

- Antisipatif dan fleksibel menghadapi dinamika perekonomian global
- Defisit anggaran terendah sejak 2013
- Keseimbangan primer mendekati Rp0
- Pembiayaan utang menurun

Penerimaan negara terus dioptimalkan

- Optimal namun tetap realistis
- Tetap menjaga iklim usaha & investasi
- Peningkatan PNBP melalui peningkatan layanan dan tata kelola

Belanja negara semakin produktif

- Reformasi belanja negara fokus untuk mendukung daya saing, ekspor dan investasi, serta pengembangan SDM
- Penguatan dan penajaman perlindungan sosial
- Pengembangan skema kreatif untuk pembangunan infrastruktur

Memperkuat belanja untuk bencana alam dan mempercepat pembangunan di daerah

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Prov. NTB dan Sulteng
- Memperkuat Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih